

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, Media Presindo. Yogyakarta. 2007

Bohari, H. *Pengantar Hukum Pajak*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1993

Brotodihardjo Santoso. R, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT Refika Aditama, Bandung, 2003

Charles Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Terjemahan)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1996

Faulkner, 2007, *Analisis Strategi Kontemporer : Konsep, Teknik,. Aplikasi*, Mitra Wacana Media, Jakarta

James E. Anderson *Public Policy Making 2nd ed.* Holt, Rinehart and Winston. New York. 1969

Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia. Jakarta.2008

Kesit Bambang Prakoso, *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press. Yogyakarta. 2003

K.J. Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, terjemahan oleh Ammanullah dkk, UI Press, Jakarta, 1988

Kotler, 2009, *Strategi Pemasaran*, Edisi I. Yogyakarta: Andi

Lupiyoadi, 2009, *Strategi dan Program Pemasaran*, Yogyakarta: Andi

M.Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara Cetakan kesebelas*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002

Muchsan. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1981

Munawir, H.S. *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 2000

- Nicholai. P. *et. al. Bestuursrecht*. Amsterdam. 1994
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Granit. Jakarta. 2005
- Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta. 2005
- Pramudya, *Hukum Itu Kepentingan*, Sanggar Mitra Sabda, Jawa Tengah, 2007
- Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*, PT Gramedia. Jakarta. 2006
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2002
- Syofyan, Syofrin dan Hidayat, Asyhar. *Hukum Pajak dan Permasalahannya*. PT Refika Aditama. Bandung. 2004
- Yuswanto, *Hukum Desentralisasi Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.

B. Sumber Lain

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3478).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3639).
- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
- Peraturan Nomor 22 Tahun 1980 Tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, tambahan lembaga negara nomor 3410),
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran Di Daerah ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyelidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyelidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Keputusan menteri perhubungan nomor KM. 65 tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1997 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 199 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis - Jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Tingkat II